

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang bertumpu pada sektor perekonomian. Letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dengan hasil alam yang melimpah mampu mengundang para investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia yang ramah tamah dan terbuka pada kebudayaan asing merupakan salah satu faktor pendukung kegiatan investasi berkembang pesat. Perekonomian Indonesia yang menganut sistem Pancasila memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta mengelola sumber daya alam, yang bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional.

Mahendra Siregar selaku kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPPM) saat memberikan sambutan di depan *Indonesia-Amerika Business Council* dan *Indonesia Diaspora Business Council* di Los Angeles Amerika Serikat, mengatakan bahwa “Indonesia saat ini sedang bergerak ke arah Indonesia yang makin kompetitif dengan adanya sejumlah perbaikan iklim investasi dalam hal percepatan dan kemudahan perizinan baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing.” Hal tersebut, membuka peluang kepada para investor untuk menanamkan modal di Indonesia dengan adanya fasilitas yang memadai (kompas.com, 29/4/2014).

Perusahaan merupakan salah satu organisasi yang kegiataannya dapat berupa bidang jasa, manufaktur, maupun perdagangan. Di dalam sebuah perusahaan, terdapat suatu struktur organisasi yang terdiri dari pemegang saham, manajer, dan staf. Dalam menjalankan tugasnya, mereka mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain di tengah perekonomian yang sedang berjalan saat ini. Namun, tidak selamanya kepentingan mereka sejalan. Asumsi sifat manusia yang ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mencapai kemakmuran hidupnya, mendasari adanya konflik kepentingan. Pemegang saham yang mempunyai kekuasaan besar dalam perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya sedangkan manajer sebagai pelaksana yang diberi mandat untuk mengelola perusahaan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan para pemberi pinjaman. Selain itu, manajer juga mempunyai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya karena secara tidak langsung pemegang saham tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan kepemilikannya yang telah diserahkan kepada manajer atau direksi sebagai agen.

Pada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai konflik kepentingan disebabkan oleh faktor perbedaan pemenuhan informasi yaitu manajer sebagai pengelola banyak mengetahui apa yang sedang terjadi dalam perusahaan sehingga dapat melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemajuan perusahaan tanpa sepengetahuan pemegang saham. Dalam hal ini, manajer mempunyai wewenang lebih banyak daripada pemegang saham karena

tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki oleh manajer. Selain itu, manajer juga ingin memaksimalkan kekayaan pribadi dengan nilai saham yang dimilikinya kecil (kurang dari 100%) sehingga tidak mempunyai semangat untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham.

Pada PT Bumi Resources Tbk diberitakan bahwa “Saham Meneg BUMN Sofyan Djalil di Bumi Resources senilai Rp 2 miliar dinilai rentan potensi konflik kepentingan karena adanya kepemilikan saham mayoritas oleh Grup Bakrie yang telah melakukan *repurchase agreement* (repo) kepada investor lain sehingga transparansi saham tersebut pun diragukan. Selain itu, Menteri BUMN sendiri berencana untuk meminta sejumlah BUMN sektor energi yang kelebihan likuiditas untuk melakukan *buy back* saham Bumi Resources. Hal ini jangan sampai utang swasta menjadi tanggungan negara”, ujar Yanuar Rizky selaku Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) (detik.com, 18/11/2008).

Pengambilan keputusan atas transaksi pemisahan investasi (*separation transaction*) Grup Bakrie dengan Bumi Plc berjalan mulus. Mayoritas pemegang saham Bumi Plc memberikan suara setuju atas proposal transaksi perceraian yang diajukan Grup Bakrie dalam RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yaitu poinresolusi mengenai penjualan kembali 29,2% saham Bumi Resources Tbk (BUMI) kepada Bakrie disetujui 91,1% pemegang saham Bumi Plc. “Hasil RUPSLB tersebut, memudahkan Bumi Plc untuk menata kembali bisnisnya setelah selama dua tahun ini terhambat konflik di level pemegang saham”, kata Nick. Sebagai langkah awal Bumi Plc akan menggunakan nama resmi baru, yaitu Asia Resources Minerals Plc (ARM) yang sudah disetujui

99,93% pemegang saham pada RUPSLB akan fokus mengembangkan bisnis PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Meskipun masih terjadi perseteruan antara Rosan Perkasa Roeslani selaku Eks-Presiden Direktur PT Berau Coal Energi Tbk (BRAU) dengan Bumi Plc yang diduga adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan Rosan semasa memimpin BRAU. Bumi Plc menyatakan Rosan menyangkal masih berkewajiban membayar 173 juta dollar AS seperti yang telah disepakati pada Juni 2013 (kompas.com, 18/12/2013).

Konflik kepentingan juga terjadi pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan energi yaitu PT PGN Tbk mengenai penggunaan pipa gas bersama dengan anak perusahaan Pertamina yaitu PT Pertagas menimbulkan ketidakpercayaan para pelaku pasar dengan adanya akuisisi yang akan dilakukan Pertamina. "Reputasi PGN sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi GCG akan ikut berpengaruh jika Pertamina masuk ke PGN. Penurunan harga saham PGN sejak awal pekan ini, menjadi indikasi pasar menolak rencana akuisisi Pertamina," ujar Rasyid. Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini kepemilikan saham PGN di pasar bursa mencapai Rp 115 triliun. Pemerintah memiliki 56,79% saham dan 43,03% milik publik. Artinya, apabila Pertamina akan membeli saham pemerintah yang ada di PGN, maka Pertamina mesti menyiapkan dana minimal Rp 70 triliun atau setara dengan 56,79% saham. Belum lagi ditambah dengan kewajiban untuk melaksanakan *tender off* (membeli saham di investor publik) saham PGN sesuai dengan peraturan otoritas pasar modal. Hal ini disebabkan karena kepemilikan aset Pertagas lebih kecil daripada PGN yang asetnya sudah dimiliki publik. Dana Pertamina akan lebih produktif jika digunakan untuk

membiyai usaha pengeboran dan pembangunan kilang minyak, sehingga tidak perlu membebani APBN (businessnews.co.id, 12/12/2013),

Masalah-masalah diatas mengenai konflik kepentingan antar investoryang meliputi struktur kepemilikan saham dan tata kelola perusahaan (GCG), dapat menimbulkan masalah keagenan(*agency conflict*).Tingginya biaya keagenan terjadi pada beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peningkatan biaya keagenan tentu merugikan bagi perusahaan karena tidak menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pengelolaan sumber dana didalam perusahaan. Tingginya biaya keagenan dapat mengakibatkan berkurangnya pemanfaatan aset (Raisya dkk, 2014).

Fenomena biaya keagenan terjadi pada PT Pertamina (Persero) yang akhirnya membubarkan Pertamina Trading Limited (Petral) karena diduga adanya korupsi di tubuh perusahaan itu.Petral, yang memiliki aset hingga \$2 miliar, selama ini memegang monopoli perdagangan minyak mentah dan bahan bakar dari dan keluar Indonesia.Bahkan, Petral dengan anak usahanya di Singapura dan Hong Kong itu mencakup sepertiga perdagangan harian minyak nasional.Sisa kebutuhan minyak nasional dipasok oleh lokal.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa pemerintah memang ingin memutus mata rantai mafia migas, sekaligus memutus reputasi buruk Petral yang membawa beban bagi Pertamina. Sudirman juga meminta Pertamina menyelesaikan likuidasi dalam waktu setahun dan melakukan audit investigasi agar jika ada penyimpangan dan *fraud* di masa lalu oleh Petral atau pihak-pihak lainnya, dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum

dan tindak pidana korupsi, hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Migas Faisal Basri mengatakan Petral memang harus segera dibubarkan karena nyaris tak punya kegiatan, kecuali yang bersifat administratif dan konsolidasi keuangan dua anak perusahaannya. Petral punya dua anak usaha, yaitu Pertamina Energy Services Pte.Ltd. (PES) yang berbasis di Singapura dan Zambesi Investments Limited (Zambesi) yang berbasis di Hongkong. Menurut Faisal Basri, pembubaran Petral sepatutnya menjadi momentum pembenahan mendasar sektor hilir Pertamina, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Bila Petral dibubarkan, Pertamina akan beruntung karena Petral sebagai induk perusahaan mencatatkan laba harus membayar pajak kepada pemerintah administratif Hongkong. "Bila Petral segera dibubarkan, dan kedua anak perusahaan Petral langsung diambil alih Pertamina, maka laba Pertamina Energy Services yang selama ini dikonsolidasikan ke Petral akan masuk sebagai penerimaan pajak pemerintah Indonesia," kata Faisal Basri dalam blog pribadinya (bareksa.com, 13/5/2015).

Audit investigasi yang dilakukan oleh pada PT Pertamina (Persero), pada anak perusahaannya Petral karena diindikasikan adanya korupsi pada perusahaan tersebut, termasuk jenis biaya keagenan yaitu *monitoring cost*. *Monitoring cost* dikeluarkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengelola saham untuk mencegah terjadinya kecurangan agar pemegang saham dapat memaksimalkan keuntungannya.

Gainscope.co.id (11/4/2014), memberitakan bahwa PT Freeport Indonesia Indonesia adalah sebuah perusahaan milik Amerika yang bergerak pada tambang emas dan tembaga di Papua tidak menyetor dividen selama dua tahun terakhir (semenjak 2011) kepada pemerintah selaku pemilik sebagian sahamnya yaitu sebesar Rp 1,5 triliun per tahun. Hal ini disebabkan karena kepemilikan negara kurang dari 10% maka kecil kemungkinan usul pemerintah disepakati oleh pemegang saham mayoritas. Disisi lain, lemahnya payung hukum di Indonesia yang melindungi hak para pemegang saham minoritas belum dapat diimplementasikan. Pada prinsip OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) yang ke-3 yaitu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham tersirat makna bahwa seharusnya tidak ada *special threatment* yang diberikan kepada pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas. Tetapi, sekilas terlihat bahwa Freeport sudah melanggar prinsip OECD yang ke-3 karena pada praktiknya, pemegang saham utama perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk memberikan pengaruhnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Sebelumnya, PT Freeport Indonesia berkontribusi dalam memberikan setoran dalam bentuk dividen ke dalam kas negara sebesar Rp 1,5 triliun per tahun. Artinya jika untuk tahun fiskal 2013 Freeport tidak juga membagikan dividen kepada pemerintah maka Negara menanggung akumulasi kerugian atas penangguhan penerimaan dividen sebesar Rp 4,5 triliun. Karena tidak adanya setoran tersebut di tahun ini, dampaknya adalah target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp 40 triliun tidak tercapai. Sementara itu, dipastikan setoran dividen yang mampu diberikan oleh

141 perusahaan negara lainnya pada tahun ini diprediksi terbatas pada kisaran Rp 37,5 triliun – Rp 38,5 triliun.

Dengan tidak menyetorkan deviden selama dua tahun terakhir, yang dilakukan oleh PT Freeport kepada pemerintah Indonesia selaku pemegang saham minoritas, menimbulkan kerugian yaitu tidak terpenuhinya target pencapaian APBN. Biaya kerugian atas investasi tersebut, termasuk biaya keagenan jenis *bonding cost*. *Bonding cost* dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan menggunakan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal (Jensen dan Meckling (1976) dalam Krisnauli (2014).

Beberapa penelitian terhadap biaya keagenan dengan menggunakan variabel berbeda, seperti yang dilakukan oleh Faizal (2004) menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, *leverage*, deviden, dan risiko. Aga dan Muchamad (2012) menggunakan komposisi dewan komisaris, struktur kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, kompensasi manajerial, *leverage*, *size*, dan usia. Selain itu, Alvina dkk (2012) menggunakan kebijakan deviden, kebijakan utang, kepemilikan asing, dan karakteristik dewan komisaris. Gul et al (2012), menggunakan kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan eksternal, ukuran dewan, dualitas, direktur independen, dan struktur remunerasi. Rahmadiyahani (2012), menggunakan kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, konsentrasi kepemilikan asing, aktivitas pengawasan dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Selain itu, Roshanawaty (2012), menggunakan variabel

kepemilikan institusional, hutang, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Pada tahun 2013, Hadiprajitno melakukan penelitian dengan variabel kepemilikan mayoritas keluarga, kepemilikan mayoritas intitusi keuangan, kepemilikan mayoritas pemerintah, kepemilikan mayoritas asing, konsentrasi kepemilikan, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit, komite nominasi/remunisasi, ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan. Raisya dkk (2014), menggunakan variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, komite audit, dan ukuran KAP. Selain itu, Novany dkk (2014) melakukan penelitian menggunakan variabel direktur eksekutif, non-eksekutif direktur, komite audit, dan dewan komisaris. Handoko (2014), menggunakan variabel *debt to asset*, *longterm-debt to asset*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian terakhir dilakukan oleh Wijayati (2015), yang menggunakan variabel kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan.

Adanya struktur kepemilikan pada sebuah organisasi dapat merubah sifat individu yaitu pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*) dalam pengelolaan aset. Pemegang saham sebagai pemilik mayoritas dapat bertindak sewenang-wenang terhadap agen yang mempunyai saham minoritas, misalnya dalam hal pembagian deviden sebagai keuntungan para pemegang saham. Fenomena ini banyak terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang sehingga banyak investor

yang tertarik menanamkan modalnya. Komposisi kepemilikan terkonsentrasi seperti yang terjadi pada BUMN, dapat menimbulkan *agency problem* dengan adanya ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Selain itu, adanya kepentingan politik di dalam tubuh BUMN dapat merugikan masyarakat yang telah menyerahkan aset negara untuk dikelola oleh manajemen BUMN, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menjadi tidak terlaksana.

Uji empiris mengenai kepemilikan pemerintah telah dilakukan oleh penelitian Aga dan Muchamad (2012) dengan menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO, tetapi berpengaruh tidak signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan OGA. Hadiprajitno (2013), menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas pemerintah berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP tetapi berpengaruh positif diukur dengan TOA. Selain itu, Raisya dkk (2014) menggunakan sampel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2007- 2011, menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan TAT.

Uji empiris mengenai kepemilikan institusional dilakukan oleh Faizal (2004) dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 1999-2001, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan tingkat perputaran

aktiva, tetapi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan beban operasi dan penjualan. Aga dan Muchamad (2012) dengan menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan yang diukur dengan ATO dan OGA. Gul etc (2012) dengan sampel perusahaan di Bursa Efek Karachi tahun 2003-2006, menghasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan rasio pemanfaatan aset. Selain itu, Rahmadiyahani (2012) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO tetapi berpengaruh negatif terhadap *agency cost* yang diukur dengan *SGA expense to sales ratio*. Roshanawaty (2012), mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang listing di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan rasio perputaran total aset. Hadiparjitno (2013), melakukan penelitian pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010 dengan hasil yaitu kepemilikan mayoritas institusi keuangan berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP tetapi berpengaruh positif diukur dengan TOA. Raisya dkk (2014) menggunakan sampel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2007-2011, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan TAT. Handoko (2014), menggunakan sampel perusahaan LQ45 di BEI tahun 2013, menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

tidak signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan *asset turn over* dan *administrative expense ratio*. Penelitian terakhir dilakukan oleh Wijayati (2015), menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap perputaran total aktiva dan berpengaruh negatif terhadap rasio biaya operasi.

Uji empiris mengenai kepemilikan asing dilakukan oleh Aga dan Muchamad (2012) dengan menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan OGA. Alvina dkk (2012) dalam penelitiannya pada perusahaan non keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap biaya keagenan ekuitas yang diukur dengan SGA dan TAT. Selain itu, Rahmadiyahani (2012) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan SGA *expense to sales ratio*. Hadiprajitno (2013), menggunakan sampel pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa kepemilikan mayoritas asing berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP tetapi berpengaruh positif diukur dengan TOA. Raisya dkk (2014), menggunakan sampel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2007-2011, menyimpulkan

bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan TAT.

Uji empiris mengenai kepemilikan terkonsentrasi dilakukan oleh Aga dan Muchamad (2012) dengan menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan ATO dan OGA. Selain itu, Hadiprajitno (2013) menggunakan sampel pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP dan TOA.

Menurut Beiner et al dalam Linda (2012), mengatakan bahwa keefektifan mekanisme *corporate governance* ditentukan oleh ukuran dan komposisi dewan, yang dapat mengurangi biaya agensi. Susunan dewan yang lebih besar akan lebih kuat, karena akan membuat koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih praktis dibandingkan susunan dewan yang kecil.

Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan menjadi isu yang penting bagi mekanisme *corporate governance* terutama yang berkaitan dengan permasalahan keagenan. Dalam pengertian teori keagenan, pemilik perusahaan (prinsipal) memberikan kewenangan pada pengelola (*agent*) untuk mengurus jalannya perusahaan serta mengambil keputusan untuk dan atas nama pemilik. Diasumsikan bahwa manusia akan memaksimalkan kepentingannya sendiri dan adanya informasi asimetrik, memungkinkan agen tidak melakukan tindakan yang terbaik bagi kepentingan prinsipal. Informasi asimetrik memungkinkan agen bertindak untuk keuntungan sendiri, dengan mengorbankan kepentingan

pemilik. Perilaku agen yang melakukan tindakan untuk memaksimalkan kepentingan sendiri menjadi bagian penting yang harus dikendalikan (*Global Association of Risk Professionals*, 2005 dalam Sugiarto dkk, 2011).

Uji empiris mengenai *corporate governance* dilakukan oleh penelitian Aga dan Muchamad (2012) menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO, tetapi berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan OGA. Alvina dkk (2012) dalam penelitiannya pada perusahaan non keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa karakteristik dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya keagenan ekuitas yang diukur dengan SGA dan TAT. Rahmadiyahani (2012) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan SGA *expense to sales ratio*. Selain itu, Hadiprajitno (2013) menggunakan sampel pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP dan TOA. Novany dkk (2014), menyimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan TATO. Penelitian Handoko (2014) menggunakan sampel perusahaan LQ45 di BEI tahun 2013, menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *agency costs* yang diukur dengan *asset turn over* tetapi berpengaruh tidak signifikan diukur *administrative expense ratio*. Penelitian

terakhir dilakukan oleh Wijayati (2015), menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013, menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap perputaran total aktiva dan berpengaruh positif terhadap rasio biaya operasi.

Uji empiris mengenai kompensasi manajerial diteliti oleh penelitian Aga dan Muchamad (2012) menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa kompensasi manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan yang diukur dengan ATO dan OGA.

Uji empiris mengenai *leverage* dilakukan oleh Faizal (2004) dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 1999-2001, menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan tingkat perputaran aktiva tetapi berpengaruh negatif signifikan diukur dengan beban operasi dan penjualan. Aga dan Muchamad (2012) menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA. Selain itu, Rahmadiyahani (2012) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan *SGA expense to sales ratio*. Roshanawaty (2012), mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang listing di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa hutang berpengaruh signifikan positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan rasio perputaran total aset. Hadiprajitno (2013), menggunakan sampel pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan

bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP dan TOA.

Uji empiris mengenai *size* dilakukan oleh penelitian Faizal (2004) dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 1999-2001, menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya keagenan yang diukur dengan tingkat perputaran aktiva tetapi berpengaruh positif dan tidak signifikan diukur dengan beban operasi dan penjualan. Aga dan Muchamad (2012), menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa *size* tidak berpengaruh terhadap *agency cost* diukur dengan ATO tetapi berpengaruh diukur dengan OGA. Selain itu, Rahmadiyahani (2012) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan SGA *expense to sales ratio*. Roshanawaty (2012), mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang listing di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan rasio perputaran total aset. Hadiprajitno (2013), menggunakan sampel pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan BIOP dan TOA. Penelitian terakhir dilakukan oleh Wijayati (2015), menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013,

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap perputaran total aktiva dan berpengaruh positif terhadap rasio biaya operasi.

Uji empiris mengenai usia perusahaan dilakukan oleh Aga dan Muchamad (2012) menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI tahun 2008-2011, menyimpulkan bahwa usia perusahaan tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA. Roshanawaty (2012), mengambil sampel perusahaan non-keuangan yang listing di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap biaya keagenan yang diukur dengan rasio perputaran total aset. Selain itu, Hadiprajitno (2013) menggunakan sampel pada perusahaan di BEI tahun 2008-2010, menyimpulkan bahwa usia perusahaan tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA.

Dalam penelitian ini, biaya keagenan diukur menggunakan rasio OGA (*Operating and General Administration*). Hal ini sejalan dengan pendapat Ang *et al.* (1999) dalam Wijayati (2015), untuk mengukur biaya keagenan dapat dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi. Rasio OGA merupakan rasio biaya yang diproksi dengan rasio biaya operasi. Rasio biaya operasi digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Semakin tinggi rasio biaya operasi ini maka semakin tinggi pemborosan yang dilakukan manajemen. Menurut asumsi organisasi efisiensi merupakan ukuran efektifitas sehingga rasio efisiensi dapat digunakan untuk mengukur biaya keagenan. Selain itu, rasio yang tinggi merupakan indikator

operasi yang tidak efisien yang menunjukkan biaya agensi yang tinggi (Ang et. al , 2000; Fachrudin, 2011; Aryani, 2011 dalam Setyaningsih,2014)

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya keagenan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Keagenan

No	Nama Peneliti	Tahun	Struktur Kepemilikan				<i>Coorporate Governance</i>	Variabel Kontrol			
			Pemerintah	Intitusalional	Asing	Terkonsentrasi	Komposisi Dewan Komisaris	Kompensasi Manajerial	<i>Leverage</i>	<i>Size</i>	Usia Perusahaan
1	Faizal	2004	–	✓	–	–	–	–	✓	✓	–
2	Aga dan Muchamad	2012	✓	×	✓/×	×	x/✓	×	×	✓	×
3	Alvina dkk	2012	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–
4	Gul etc	2012	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
5	Rahmadiyahani	2012	–	✓	×	–	–	–	×	×	–
6	Roshanawaty	2012	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
7	Hadiprajitno	2013	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	×
8	Raisya dkk	2014	×	×	×	–	–	–	–	–	–

No	Nama Peneliti	Tahun	Struktur Kepemilikan				<i>Coorporate Governance</i>	Kompensasi Manajerial	<i>Leverage</i>	<i>Size</i>	Usia Perusahaan
			Pemerintah	Intitusalional	Asing	Terkonsentrasi	Komposisi Dewan Komisaris				
9	Novany dkk	2014	–	–	–	–	✓	–	–	–	–
10	Handoko	2014	–	×	–	–	✓	–	–	–	–
11	Wijayati	2015	–	✓	–	–	–	–	–	–	–

Keterangan:

✓ = berpengaruh

× = tidak berpengaruh

– = tidak meneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi biaya keagenan. Penulis tetap menggunakan variabel kontrol kompensasi manajerial karena masih jarang yang meneliti, meskipun hasil penelitian variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aga dan Muchamad (2012) yang menggunakan sampel pada perusahaan keuangan di BEI 107 perusahaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO, tetapi berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan OGA. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO, tetapi berpengaruh tidak signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan OGA. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA. Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan OGA. Kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA. Kompensasi manajerial tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA. *Size* tidak berpengaruh terhadap *agency cost* diukur dengan ATO tetapi

berpengaruh diukur dengan OGA. Usia perusahaan tidak berpengaruh terhadap *agency cost* yang diukur dengan ATO dan OGA.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aga dan Muhamad (2012) menggunakan perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010, sehingga terdapat sampel 107 perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan tahun penelitian dari tahun 2005 sampai 2015, sehingga didapat sample sebanyak 33 perusahaan. Hal ini dilakukan, karena penulis ingin mendapatkan data perusahaan terkini agar relevan dengan keadaan sekarang. Selain itu, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan BUMN Publik sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Roediyanto (2012) bahwa *agency problem* pada BUMN yang telah go public relatif lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN, karena mayoritas pemegang saham adalah pemerintah dengan karakteristik hampir selalu berganti tiap periode, tidak terlalu memperhatikan pada harga saham BUMN. *Agency problem* merupakan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pemisahan antara kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, serta manajemen perusahaan yang dilakukan oleh pihak yang disewa oleh pemegang saham, yang umumnya tidak memiliki bagian kepemilikan atas perusahaan. *Agency problem* merupakan hasil informasi yang asimetris antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Dan kondisi ini merupakan hal yang umum terjadi pada BUMN di Indonesia. Dampak negatif dari *agency problem* akan mengakibatkan *agency cost*. Perbedaan yang terakhir yaitu, pada penelitian Aga dan Muhamad (2012), menggunakan alat ukur

ATO dan OGA untuk mengukur biaya keagenan. Sedangkan, dalam penelitian ini, biaya keagenan diukur dengan menggunakan OGA (*Operating, General, and Administration*), karena berdasarkan fenomena tentang biaya keagenan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola (agen), dapat menimbulkan biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya operasi, administrasi, dan penjualan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mengambil judul “**Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Coorporate Governance* Terhadap Biaya Keagenan (Suatu Studi Pada Perusahaan BUMN Publik Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2005-2015).**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan pemerintah pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
2. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
3. Bagaimana kepemilikan asing pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
4. Bagaimana kepemilikan terkonsentrasi pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.

5. Bagaimana komposisi dewan komisaris pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
6. Bagaimana biaya keagenan pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
7. Seberapa besar pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap biaya keagenan pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
8. Seberapa besar pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan komposisi dewan komisaris berpengaruh secara simultan terhadap biaya keagenan pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan pemerintah pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
2. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.

3. Untuk mengetahui kepemilikan asing pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
4. Untuk mengetahui kepemilikan terkonsentrasi pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
5. Untuk mengetahui komposisi dewan komisaris pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
6. Untuk mengetahui biaya keagenan pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan komposisi dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap biaya keagenan pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan terkonsentrasi, dan komposisi dewan direksi berpengaruh secara simultan terhadap biaya keagenan pada perusahaan BUMN publik sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2005-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang kajian akuntansi keuangan khususnya tentang faktor-faktor yang menimbulkan biaya

keagenan dan penerapan nilai-nilai tata kelola yang baik dalam bidang pendidikan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Adapun beberapa kegunaan praktis/empiris dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dalam mengelola aset untuk meningkatkan kinerja memberikan kontribusi para pemakai laporan keuangan dalam memahami dan menerapkan prinsip *corporate governance*.
3. Bagi investor, memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan sehingga dapat membuat keputusan dalam berinvestasi di perusahaan BUMN publik.
4. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dalam penyusunan karya ilmiah dengan objek penelitian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil melalui website yaitu Saham OK, Bursa Efek Indonesia, dan *Indonesian Capital Market Electronic Library*. Waktu penelitian dimulai dari April 2015.